



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN BAKN DPR RI  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025  
(16 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024)  
PERIODE ANGGOTA DPR RI 2019 - 2024**

-----

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 27 Mei 2024 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Periode Anggota 2019 - 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 30 September 2024, berjumlah 31 (tiga puluh satu) hari kerja atau 46 (empat puluh enam) hari kalender. Sedangkan Masa Reses tidak ada.

Kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 karena diakhir periode Anggota DPR RI Periode 2019 – 2024, sudah mulai berkurang dan lebih difokuskan pada kegiatan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di BAKN DPR RI secara fisik dan Melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka diplomasi parlemen dan kegiatan paket meeting dalam rangka mendapatkan masukan para pakar baik dari akademisi maupun praktisi terhadap LHP BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian BAKN DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

**FUNGSI PENGAWASAN**

Dalam fungsi Pengawasan BAKN DPR RI telah melakukan Melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Vietnam dalam rangka diplomasi parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja National Assembly of Vietnam-Finance and Budget Committee/Public Account Committee dan Supreme Audit Institution of Vietnam-State Audit.

**II. PELAKSANAAN KEGIATAN:**

Rapat Pimpinan BAKN DPR RI, Senin, 19 Agustus 2024 membahas dan mengesahkan Rancangan Jadwal Acara Kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025 Periode Anggota DPR RI 2019 - 2024 dilanjutkan Rapat intern menetapkan Rancangan Jadwal Acara Kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025 mulai tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024.

## **BIDANG PENGAWASAN**

### **1. Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara lain di Parlemen Negara tersebut .**

#### **A. Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Vietnam dalam rangka diplomasi parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja National Assembly of Vietnam-Finance and Budget Committee/Public Account Committee dan Supreme Audit Institution of Vietnam-State Audit, 17 s.d 21 September 2024.**

Tujuan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Republik Sosialis Viet Nam adalah :

1. Untuk memahami tugas, fungsi, wewenang dan gambaran umum tentang Finance-Budget Committee Parlemen Vietnam (National Assembly of Vietnam) dan gambaran khusus tentang The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam yang terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.
2. Memahami mekanisme kerja antara Finance-Budget Committee of The National Assembly of Vietnam dengan The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam, dan bagaimana The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam mendukung kebutuhan parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
3. Mendapatkan gambaran utuh dan komprehensif terkait dengan jenis, kategori, ruang lingkup, dan time schedule pemeriksaan keuangan negara oleh The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam, penyampaian hasil pemeriksaan kepada Finance-Budget Committee of The National Assembly of Vietnam, dan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan antara National Assembly of Vietnam dengan The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam.
4. Mendapatkan gambaran empirik bagaimana Finance-Budget Committee National Assembly of Vietnam melakukan penelaahan/reviu atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam, dan committee terkait lainnya.
5. Mendapatkan gambaran tentang hubungan kerja antara Finance-Budget Committee dengan committee lain di National Assembly of Vietnam (Parlemen Vietnam), khususnya terkait dengan hasil pemeriksaan The Supreme Audit Institution Of Vietnam-State Audit Office Of Vietnam.
6. Mengetahui gambaran mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Auditor General of Vietnam yang terkait dengan pengawasan terhadap keuangan negara.
7. Mengetahui mekanisme kerja antara Auditor General of Vietbam dengan Finance-Budget Committee, dan bagaimana Auditor General of Viet Nam mendukung kebutuhan parlemen dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
8. Mendapatkan gambaran jenis, ruang lingkup, dan time schedule pemeriksaan keuangan negara oleh Auditor General of Viet Nam dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada Finance-Budget Committee of The National Assembly of Viet Nam.

Kunjungan kerja delegasi BAKN DPR RI ke Viet Nam mendapatkan hasil dan informasi meliputi dan tidak terbatas pada :

1. **Pertemuan dengan the Finance-Budget Committee of The National Assembly of Viet Nam**

**Gambaran Umum Tentang National Assembly of Vietnam Majelis Nasional Vietnam**

Majelis Nasional Vietnam adalah representasi tertinggi rakyat; otoritas tertinggi Republik Sosialis Vietnam. Majelis ini mempunyai tiga (03) fungsi utama: (1) membentuk undang-undang; (2) menetapkan keputusan terhadap persoalan-persoalan penting bangsa; dan (3) mengawasi pada tingkat tertinggi terhadap seluruh kegiatan Negara.

Sesuai dengan konstitusi Vietnam, sala satu tugas pokok dan hak khusus majelis atau badan ini adalah : melaksanakan hak pengawasan tertinggi atas kepatuhan terhadap Konstitusi, undang-undang dan resolusi Majelis Nasional; memeriksa pekerjaan Presiden Negara, Komite Tetap, Pemerintah, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Vietnam, Dewan Pemilihan Umum Nasional, Kantor Audit Negara Vietnam dan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh Majelis Nasional; menetapkan peraturan dan operasionalisasi Majelis Nasional, Presiden Negara, Pemerintah, Pengadilan Rakyat, Kejaksaan Rakyat, Dewan Pemilihan Umum, Badan Audit Negara Vietnam, pemerintah daerah dan badan-badan lain yang dibentuk oleh Majelis Nasional; dan memilih, memberhentikan, menjalankan peranan Presiden Negara, Wakil Presiden Negara, Ketua Majelis Nasional, Wakil Ketua Majelis Nasional, Anggota Panitia Tetap Majelis Nasional, Ketua Dewan Etnis , Ketua Komite Majelis Nasional, Perdana Menteri Pemerintah, Ketua Mahkamah Agung Rakyat, Jaksa Agung Inspeksi Agung Rakyat, Ketua Dewan Pemilihan Umum Nasional, Auditor Umum Negara, Kepala lembaga lain yang dibentuk oleh Majelis Nasional; menyetujui usulan pencalonan, pemberhentian dan pemberhentian Wakil Perdana Menteri, Menteri dan kabinet Pemerintah, Ketua Mahkamah Agung Rakyat; menyetujui daftar nama anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Dewan Pemilihan Umum;

Masa jabatan masing-masing Badan Legislatif Majelis Nasional adalah lima tahun, terhitung sejak sidang pembukaan pertama masa jabatan sampai sidang pembukaan pertama sidang Majelis Nasional berikutnya. Dalam keadaan khusus, jika sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota parlemen menyetujui secara konsensus masa jabatan untuk diperpendek atau diperpanjang atas permintaan Komite Tetap. Perpanjangan masa jabatan tidak akan melebihi 12 bulan kecuali dalam keadaan perang.

Majelis Nasional Vietnam dipimpin oleh Ketua dan memimpin sidang Majelis Nasional; menandatangani pengesahan Konstitusi, Undang-undang, Resolusi Majelis Nasional; memimpin pekerjaan Komite Tetap Majelis Nasional; mengarahkan kegiatan luar negeri Majelis Nasional; menjaga komunikasi dengan anggota parlemen.

Delegasi BAKN DPR-RI yang dipimpin H. Wahyu Sanjaya, SE., M.Si telah melakukan kunjungan kerja ke Viet Nam dalam rangka melakukan pertemuan dengan Finance-Budget Committee of The National Assembly of Viet Nam. Pertemuan dilakukan dalam rangka sharing best practices, melakukan pertukaran informasi terkait sistem dan mekanisme audit serta pengawasan antar lembaga negara di Viet Nam dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi BAKN DPR-RI didampingi staf KBRI Viet Nam.

Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR-RI ke Viet Nam diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dan Viet Nam serta berkontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa hal yang didapat dari hasil diskusi adalah sebagai berikut :

1. Wakil Ketua Komite Keuangan dan Anggaran Majelis Nasional Vietnam menyambut dan menyampaikan salam kepada delegasi Indonesia. Kunjungan BAKN menunjukkan komitmen untuk bekerja sama erat antara kedua Parlemen, menuju peringatan 70 tahun hubungan kedua negara. Ketua Majelis Nasional Vietnam telah berhasil menyambut Presiden terpilih Indonesia, Prabowo, yang akan menjabat sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober. Bapak Le Quang Manh, Ketua Komite, sedang menjalankan tugas lain sehingga tidak dapat menghadiri pertemuan ini tersebut dan mewakilkan kepada Wakil Ketua.
2. Tujuan pertemuan adalah untuk mempererat hubungan dan kerja sama antara BAKN dan Komite Keuangan dan Anggaran Majelis Nasional, serta belajar praktik dan berbagi pengalaman.
3. Komite NAV sepakat dan sangat mengapresiasi semangat belajar dan berbagi dari BAKN. Ketua ingin berbagi sedikit tentang arsitektur dan konstruksi Gedung Majelis Nasional. Gedung Majelis Nasional dibangun 79 tahun yang lalu. Pada Januari 2026 nanti, Majelis Nasional akan merayakan 80 tahun pendiriannya. Majelis Nasional sekarang memiliki 499 anggota, dengan persentase perempuan yang tinggi, yaitu 30% pada periode 2021–2026. Majelis Nasional memiliki 10 komite dan komisi; selain itu, Sekretariat Majelis Nasional dan Kantor Majelis Nasional adalah dua lembaga pendukung dan konsolidasi untuk komite dan komisi.
4. Pada periode 2021–2026, Majelis Nasional telah mengesahkan 40 Undang-Undang dan Amandemen Undang-Undang, serta 40 Keputusan, 25 di antaranya terkait dengan Keuangan dan Anggaran. Ke depannya, Majelis Nasional akan mengamandemen pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi khusus, dan pajak penghasilan perusahaan.
5. struktur Komite Keuangan dan Anggaran, terdapat 42 anggota, 11 di tingkat pusat, dan 31 anggota lainnya bekerja di tingkat provinsi. Komite terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua, di mana 4 dari 5 wakilnya adalah perempuan, sementara yang tersisa adalah anggota tetap.
6. Terdapat 5 Sub-Komite di bawah Komite: Sub-Komite Sintesis Anggaran; Sub-Komite Investasi Publik; Sub-Komite Kebijakan Pengumpulan Anggaran; Sub-Komite Penyelesaian dan Audit;

serta Sub-Komite Aset Publik dan Keuangan Negara di luar Anggaran.

7. Berbeda dengan Indonesia, Badan Audit Negara Vietnam (SAV) adalah lembaga independen. Tanggung jawab dan kekuasaannya diatur dalam Undang-Undang Audit Vietnam. Para auditor bertanggung jawab untuk mengaudit, menyelesaikan anggaran negara, mengawasi topik-topik tertentu, menjelaskan, mencairkan dana investasi publik, serta menjelaskan rekomendasi dari audit negara.
8. Badan Audit Negara Vietnam mengikuti standar dan aktivitas INTOSAI; oleh karena itu, mirip dengan BPK di Indonesia. Independensi diatur oleh Undang-Undang. Vietnam memiliki sekitar 600 auditor.
9. Majelis Nasional hanya memilih 1 posisi, yaitu Auditor Jenderal, sedangkan Wakil Auditor Jenderal lainnya disetujui oleh Komite Tetap. Sementara itu, Indonesia memiliki 9 Auditor Jenderal yang dipilih melalui pemungutan suara di Parlemen, mereka mewakili berbagai partai. Setelah pemilihan 9 Auditor Jenderal, mereka akan melakukan pemungutan suara internal untuk menentukan pimpinan utama.
10. SAV hanya melapor kepada Majelis Nasional. Majelis Nasional tidak memberikan rekomendasi atau ikut campur dalam rencana SAV. SAV mengirim laporan hasil pemeriksaan (laporan audit) 2 kali per tahun untuk laporan ringkasan hasil Audit. Selain itu, SAV juga mengirim laporan lain ke Komisi untuk referensi. Masa jabatan Auditor Jenderal SAV adalah 5 tahun, sebelumnya 7 tahun. Namun demikian, belum ada Auditor Jenderal yang menjabat lebih dari dua periode. Tidak ada aturan atau undang-undang tentang masa jabatan Auditor Jenderal.
11. Meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang, kesetaraan gender dalam organisasi politik Vietnam selalu dipromosikan dan Majelis Nasional sendiri juga mengarahkan bahwa jumlah anggota perempuan mencapai 30% dari total anggota Majelis Nasional. Pada periode ini, jumlah perempuan di Majelis Nasional mencapai 30,26%.
12. Anggaran nasional dihitung dan diselesaikan oleh Majelis Nasional. Anggaran nasional dibagi menjadi 4 tingkat: Pusat, Daerah (termasuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota). Tingkat daerah akan diselesaikan oleh Dewan Rakyat. Anggaran pusat mencakup lebih dari 50% dari total anggaran.
13. Penyalahgunaan keuangan negara di Viet Nam terdeteksi melalui berbagai saluran seperti audit dan inspeksi pemerintah, atau Komite Keuangan dan Anggaran. Lembaga yang mendeteksi masalah akan menanganinya. Jika pelanggaran menunjukkan tanda-tanda kriminal, itu akan diserahkan kepada Kementerian Keamanan Publik.
14. Komite audit, para ahli senior, mengevaluasi hasil audit. Sementara itu, Indonesia adalah sistem multi-partai dengan 81 daerah pemilihan di seluruh negeri. Indonesia memiliki 24 partai, dan hanya 8 yang berhasil masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat

pada Periode tahun 2024-2029. Partai-partai itu perlu memiliki total 4% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia menargetkan 20% perwakilan perempuan, namun angka ini belum tercapai setiap tahunnya. Tahun ini jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat adalah 21%, sedangkan tahun lalu 17%.

15. Batas utang publik Indonesia tidak boleh melebihi 60% dari PDB. Defisit anggaran tidak boleh melebihi 3% dari PDB. Batas utang publik Vietnam tidak melebihi 60%. Ketika batas utang publik melebihi 55%, akan ada peringatan dari Majelis Nasional, dan defisit anggaran tidak melebihi 3,7% dari PDB. Secara umum, kedua negara memiliki kemiripan dalam konteks defisit dan utang publik.

Pokok bahasan pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Mrs. Pham Thuy Chinh, Vice Chairwoman Finance-Budget Committee – National Assembly (NA) Viet Nam antara lain :

1. BAKN dan Finance-Budget Committee – National Assembly (NA) sepakati pentingnya menjaga pertukaran antara parlemen dan terus mendorong Kerjasama bilateral menuju peringatan 70 tahun pembukaan hubungan Diplomatik pada tahun 2025.
2. Para pihak sepakat pentingnya memajukan keterwakilan perempuan dalam legislative
  - NA Viet Nam beranggotakan 499 anggotayang 30,26 % diantaranya adalah perempuan. Aturan Viet Nm tidak spesifik menetapkan persyaratan kuota keterwakilan perempuan di parlemen.
  - Kebersamaan kebijakan Viet Nam dan Indonesiaterkait Rasio utang terhadap PDB yakni 60 m% dan GDP. Indonesia tetapkan batas maksimum deficit APBN 3 % dan GDP sementara Viet Nam 3,7 %.



Foto Bersama antara The Budget - Finance Committee of The National Assembly Vietnam dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI. Hadir dari Komite Keuangan dan Anggaran NAV adalah : Ms. Pham Thuy Chinh, Vice Chairman of the Finance and Budget Committee, Mr. Tran Van Lam, Standing Member of the Finance and Budget Committee, Mr. Le Minh Nam, Standing Member of the Finance and Budget Committee, Nguyen Thanh Trung, Standing Member of the Finance and Budget Committee, Ms. Tran Thi Hong An, Standing Member of the Foreign Affairs Committee, Ms. Bui Thi Quynh Tho, Standing Member of the Economic Committee, Mr. Vu Danh Hiep, Director of the Finance and Budget Department.

## **2. Pertemuan dengan Deputy Auditor General of The State Audit Viet Nam**

### **Gambaran Umum Tentang The Supreme Audit Institution of Vietnam—State Audit Office of Vietnam (SAV)**

State Audit Office of Vietnam atau Lembaga Audit Negara Tertinggi Vietnam – disebut pula Kantor Audit Negara Vietnam (SAV) didirikan pada tanggal 11 Juli 1994. Selama lebih dari satu dekade, SAV merupakan subordinasi atau lembaga dibawah kendali Pemerintah Vietnam. Organisasi dan tata kelola termasuk penugasan audit diputuskan oleh Pemerintah. Sementara itu, kegiatan pelatihan staf, penetapan standar dan proses audit profesional berada di bawah kendali langsung oleh Perdana Menteri.

Tahun 2006, SAV berubah menjadi lembaga independen pada saat Undang-Undang Pemeriksaan Negara pertama kali berlaku pada tanggal 1 Januari 2006. Undang-undang tersebut memandatkan SAV adalah badan khusus pemeriksa keuangan Negara yang dibentuk oleh Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) dan beroperasi secara independen dan bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan ini bertugas melaksanakan fungsi audit keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja pada semua lembaga dan organisasi yang menggunakan anggaran negara, termasuk penggunaan seluruh aset Negara di Vietnam.

SAV saat ini menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Audit Negara yang direvisi pada tahun 2015. Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sebagai aturan turunan atas status hukum Konstitusional SAV yang baru, untuk lebih menegaskan independensi SAV dan untuk memperluas mandat SAV.

Pertemuan dengan Deputy Auditor General of The State Audit Viet Nam menghasilkan pokok-pokok diskusi sebagai berikut :

1. Wakil Auditor General SAV menyampaikan salam kepada delegasi Indonesia dan menyampaikan permohonan maaf dari Auditor General tidak dapat menyambut delegasi Indonesia dan mewakilkan kepada Deputy Auditor General.
2. Pihak Indonesia sangat mengapresiasi sambutan hangat dan penerimaan dari SAV. Kepala Delegasi memperkenalkan daftar delegasi Indonesia.
3. Tujuan pertemuan adalah mempererat hubungan dan kerja sama antara BAKN dan SAV, serta belajar praktik dan berbagi pengalaman.
4. SAV telah berdiri selama 30 tahun dan telah bekerja sama dengan BPK Indonesia, saling membantu dalam kegiatan bilateral dan multilateral. Mengikuti sistem politik satu partai, SAV agak berbeda

- dengan BPK. Hasil laporan SAV disampaikan langsung kepada Majelis Nasional.
5. Beberapa tanggung jawab utama SAV: SAV bertanggung jawab untuk memperkirakan anggaran negara, menyusun rencana alokasi anggaran pusat, rencana penyesuaian anggaran negara, rencana pengaturan anggaran untuk program target nasional dan proyek nasional penting yang diputuskan oleh Majelis Nasional, serta menyelesaikan anggaran negara; berpartisipasi dengan komisi Majelis Nasional dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang, resolusi Majelis Nasional, dan resolusi Komite Tetap Majelis Nasional di bidang keuangan dan anggaran, mengawasi pelaksanaan anggaran negara dan kebijakan keuangan sesuai permintaan; menjelaskan hasil audit kepada Majelis Nasional dan komisi Majelis Nasional sesuai dengan undang-undang.
  6. Vietnam memiliki sekitar 1700 auditor. Selain pimpinan, SAV memiliki 7 departemen penasihat, 8 departemen audit khusus, dan 13 kantor audit negara regional. Setiap kantor regional bertanggung jawab atas 4-5 provinsi di Vietnam. 1700 auditor harus menjadi pejabat negara, lulus ujian SAV untuk menjadi pejabat dan pejabat senior.
  7. Seorang auditor dan pejabat negara dapat dimobilisasi ke posisi lain. Saat ini terdapat sertifikasi global seperti ACCA dan CPA untuk auditor, namun harus lulus ujian masuk SAV untuk menjadi pejabat SAV. Kompensasi SAV lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Gaji serupa dengan posisi negara lainnya, namun auditor SAV mendapatkan tunjangan khusus. Secara umum, pendapatan auditor lebih tinggi dibandingkan pejabat negara lainnya.
  8. SAV memiliki peran penting dalam struktur negara. Auditor Jenderal independen dalam hal profesi/teknis, tetapi di bawah arahan Partai karena Vietnam hanya memiliki satu Partai. Segala sesuatu harus berada di bawah panduan Partai.
  9. Majelis Nasional memilih Auditor Jenderal melalui pemungutan suara. Di masa lalu, ada 2 orang yang tidak lulus pemungutan suara (perlu di atas 50% suara).
  10. Ada 3 lembaga yang menerima laporan hasil audit SAV yaitu Auditor General, Komite Keuangan dan Anggaran Majelis Nasional, dan Kementerian Keuangan. Setiap bulan Mei, SAV harus menyerahkan laporan ringkasan dan lampiran semua audit selama setahun kepada Majelis Nasional, dan hasil semua audit ini harus diumumkan melalui konferensi pers. Menurut undang-undang, pendapat auditor dianggap benar, dan unit tersebut diwajibkan untuk melaksanakannya.
  11. Vietnam memiliki 19 korporasi dan grup dengan mayoritas saham dimiliki oleh negara. Sementara itu, Laporan Hasil Pemeriksaan di Indonesia sangat kompleks, harus komprehensif dan menyoroti poin-poin penting.

Adapun pokok pokok bahasan dalam pertemuan tersebut diatas antara lain adalah :

- SAV telah berdiri selama 30 tahun dan memiliki sekitar 17000 auditor pada berbagai tingkatan pegawai SAV merupakan pegawai pemerintah yang direkrut melalui ujian masuk. Pegawai negari pada instansi ini dapat menjadi auditor di SAV dengan catatan harus memiliki sertifikasi keahlian auditor.
- Laporan audit dari SAV akan disampaikan kepada NA dan Kementerian Keuangan. Hasil temuan yang diperoleh akan diumumkan secara terbuka kepada publik . Apabila terdapat temuan pelanggaran yang berimplikasi pidana akan ditindaklanjuti oleh Ministry of Public Security.
- Kedua pihak bertukar informasi mengenai mekanisme pemilihan anggota Supreme Audit Agency, antara kedua negara :
  - 1) Auditor General SAV dipilih oleh NA, jabatan tersebut hanya diisi satu orang dengan masa jabatan lima tahun dan maksimal dua periode. Selanjutnya Auditor General berwenang menentukan lima orang pejabat untuk mengisi jabatan Deputy Auditor General.
  - 2) Sedangkan di Indonesia BPK RI terdiri dari 9 anggota yang dipilih oleh DPR RI kemudian dalam sidang internal yang dilakukan Anggota BPK akan ditentukan siapa yang akan menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua.





Foto Bersama antara State Audit of Viet Nam dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI di Kantor State Audit of Viet Nam. Hadir dari SAV adalah : . Ms. Ha Thi My Dung, Deputy Auditor General, Mr. Do Van Tao, DG of Personnel and Organization, Mr. Le Hoai Nam, DDG of General Affairs, Ms. Dang Thi Hoang Lien, DDG of Audit Policy and Quality Control, Mr. Huynh Huu Tho, DDG of Legal, Mr. Le Tung Lam, Chairman of Office, Mr. Nguyen Viet Hung, DDG of International Cooperation, Mr. Nguyen Viet Ha, secretary of Vice Auditor General.

### 3. Pertemuan dengan Kepala KBRI Viet Nam terdapat beberapa catatan :

- Pertukatan dalam rangka sharing best practices terkait sistem dan mekanisme audit serta pengawasan antar lembaga negara yang dilakukan BAKN DPR RI bermanfaat dalam upaya bersama untuk memajukan good government dan tata kelola keuangan negara yang efektif dan efisien.
- Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR RI ke Hanoi diharapkan dapat meningkatkan kedekatan dan kerjasama erat antar parlemen kedua negara khususnya dalam mendukung komitmen elevasi Kemitraan Strategis menjadi Comprehensive Strategic Partnership pada peringatan 70 tahun pembukaan hubungan diplomatik RI – Viet Nam pada tahun 2025.



Foto Bersama antara Duta Besar Indonesia untuk Negara Viet Nam dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI di Kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk Negara Viet Nam

**2. Kunjungan Kerja Dalam Negeri BAKN Pada Masa Persidangan ini dengan Tema “Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).”**

**A. Kunjungan Kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, di Tangerang Kota, Provinsi Banten, tanggal 26 September sampai dengan 28 September 2024 dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).**

Pada pertemuan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM, Di Tangerang Banten, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut.

- a. Perolehan PNBP Keimigrasian menunjukkan presentase yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan 6 tahun terakhir (2019-2024) sebesar 49%. Tahun 2020-2021 realisasi anggaran sumber dana PNBP mengalami penurunan karena pandemi covid19. Alokasi anggaran difokuskan untuk kegiatan penanganan covid-19. Pada tahun 2022 capaian PNBP mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 230,17%, dan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 320,64%, melalui kebijakan Layanan Eazy Paspor dan Paspor Simpatik, kebijakan masa berlaku Paspor 10 tahun, optimalisasi layanan pembayaran dari luar negeri, perluncuran aplikasi Molina untuk layanan e-Visa (termasuk e-VOA), dan kebijakan Golden Visa.
- b. Realisasi PNBP 2024 sampai dengan 27 September Agustus 2024 realisasi PNBP fungsional keimigrasian sudah mencapai Rp6,497,116,223,078 (108,40%) dari target Rp6,003,003,650,000. Realisasi PNBP Tahun 2024 dipengaruhi oleh kondisi politik dan perekonomian cenderung stabil, sehingga semua kebijakan dan inovasi layanan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Selain itu tidak bertambahnya negara subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang memiliki pengaruh besar terhadap PNBP Visa.
- c. Pendapatan terbesar PNBP didapat dari PNBP visa kurang lebih 60%. PNBP yang bisa digunakan dan kembali kepada pemungut yaitu Dirjen Imigrasi adalah sebesar 79,18% yang digunakan untuk kegiatan dan pembiayaan keimigrasian. Secara faktual di lapangan dana PNBP yang diterima Dirjen Imigrasi dari Kementerian Keuangan setiap tahunnya hanya mencapai 69-70%.
- d. Beberapa kebijakan PNBP oleh Dirjen Imigrasi Tahun 2025:
  - Peningkatan pelayanan keimigrasian.
  - Deregulasi kebijakan untuk memfasilitasi orang asing yang membawa manfaat/benefit.
  - Peningkatan pengawasan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengantisipasi dampak kebijakan yang memudahkan masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia.
  - Perubahan dan penambahan jenis dan tarif PNBP keimigrasian.

- e. Tantangan pengelolaan PNBP diantaranya adalah:
- situasi politik pasca peralihan pemerintahan yang berpotensi mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat serta hubungan antara negara. Hal tersebut akan berdampak pada jumlah permohonan paspor, visa dan izin tinggal.
  - tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang mudah, cepat dan terjangkau sehingga harus terus mengembangkan layanan dan sistem teknologi informasi.
  - pengembangan dan penyempurnaan aplikasi & metode pembayaran PNBP antara lain: deregulasi kebijakan pembayaran internasional, integrasi aplikasi antar layanan (permohonan s.d. pembayaran), rekonsiliasi data layanan melalui kesisteman.
  - deregulasi kebijakan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan kedatangan orang asing ke Indonesia. Termasuk bertambahnya negara yang menjadi subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang dapat menyebabkan hilangnya potensi pnbp keimigrasian dari visa sekitar Rp3 triliun serta usulan perubahan tarif PNBP keimigrasian.
  - Peningkatan pengawasan terhadap orang asing sebagai dampak kebijakan yang memudahkan masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia.

#### ❖ KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

1. Salah satu permasalahan pada pengelolaan PNBP Dirjen Imigrasi adalah potensi kehilangan PNBP pada penerapan kembali bebas visa kunjungan atas negara yang tidak memberikan asas timbal balik, untuk mencegah permasalahan tersebut maka Dirjen Imigrasi akan mengusulkan untuk tidak adanya penambahan negara sebagai subjek BVK.
2. Untuk mengoptimalkan sistem aplikasi visa, izin tinggal dan perlintasan maka dilakukan pembuatan dan implementasi Sistem Aplikasi Modul Online Layanan Imigrasi Indonesia (MOLINA) izin tinggal keimigrasian di seluruh Kantor Imigrasi. Selanjutnya kedepannya setiap layanan keimigrasian yaitu visa, izin tinggal dan perlintasan akan terintegrasi dalam satu aplikasi MOLINA.
3. Permasalahan signifikan yang menjadi kendala untuk mencapai PNBP yang optimal diantaranya adalah situasi politik, keamanan dan perekonomian masyarakat yang berpengaruh pada jumlah paspor, visa dan izin tinggal. Selanjutnya iklim investasi yang baik didukung dengan regulasi yang mudah dan dapat dipercaya, promosi yang pemenuhan fasilitas pariwisata, modernisasi sistem untuk kemudahan pelayanan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan PNBP. Penambahan negara yang menjadi subjek BVK tanpa penerapan asas timbal balik yang mengakibatkan kehilangan potensi PNBP.
4. Perlunya dilakukan perbaikan regulasi yang perlu diterapkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola PNBP dibidang administrasi diantaranya penyempurnaan UU, PP dan PMK terkait pengelolaan PNBP saat ini sedang dalam tahap harmonisasi. Subtansi yang perlu menjadi perhatian diantaranya mekanisme pemanfaatan dana PNBP untuk mendukung peningkatan realisasi PNBP; fleksibilitas penunjukan atau penugasan Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP melalui pihak ketiga untuk mendukung atau memberikan kemudahan untuk pemohon/wajib bayar; deregulasi kebijakan

Kemenkeu, BI dan OJK terkait modernisasi sistem untuk memberikan kemudahan pelayanan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP; Pengesahan RPP jenis dan tarif PNBP Kemenkumham, PP Jenis dan Tarif PNBP Kemenkumham No.28/2019 sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

5. Modernisasi yang dilakukan imigrasi dilakukan secara massive dimana semua sistemnya menggunakan digital, akan tetapi efek dari digitalisasi juga tidak terlepas dari ketergantungan terhadap perusahaan pengelola atau program aplikasi juga tinggi. Hal ini juga perlu mempertimbangkan bagaimana mitigasi risiko yang seharusnya dilakukan oleh imigrasi.
6. Menyoroti kedatangan para wisatawan yang datang terutama di Bali, namun berperilaku tidak baik yang terkadang merugikan dan mengganggu warga lokal. Sehingga perlunya penegasan dari pihak dirjen imigrasi mengenai antisipasi serta perlunya penanganan yang lebih serius agar tidak semakin meluas. Hal menjadi tantangan sendiri bagi Dirjen Imigrasi serta sedang merencanakan pembangunan terkait peningkatan pengawasan keimigrasian yang fokusnya kepada pengawasan. Memiliki beberapa program operasi gabungan dan mandiri dengan stakeholder dan kementerian lembaga terkait. Dengan melakukan filterisasi terhadap WNA yang akan datang dan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Pemprov Bali.
7. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tidak memperbanyak aplikasi, pentingnya penambahan fitur daripada aplikasi agar lebih efisien.
8. Menjadi suatu kewajiban bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memberikan pelayanan yang baik, dan berharap adanya pengawasan dari BAKN DPR RI agar tujuan dari yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

**3. Kegiatan Paket Meeting, Rapat Konsultasi, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Kerja (Raker) dalam rangka mendapatkan masukan dari para Pakar**

1. Rapat Konsultasi BAKN DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tanggal 1 Juli 2024 dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Pengelolaan PNBP di Ruang Rapat BPK RI.
2. Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAKN DPR RI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) pada tanggal 1 Juli 2024 dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Pengelolaan PNBP di Ruang Rapat BPKP RI.
3. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Sunarsip, Ak., CA., ME selaku Ekonomi Senior The Indonesia Economic Intelligence, pada tanggal 2 Juli sampai dengan 4 Juli 2024 dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Nurkholis, SE. MSE Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI, pada tanggal 7 Juli sampai dengan 9 Juli 2024 dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

5. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI dengan Pakar Ekonomi Faisal Basri, S.E., M.A, Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si., dan Dr. Tauhid Ahmad, ME pada tanggal 10 Juli 2024 jam 10.00 WIB sd Selesai dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelahaan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAKN DPR RI dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tanggal 10 Juli 2024 jam 13.00 WIB sd Selesai dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelahaan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
7. Rapat Pimpinan (Rapim) BAKN DPR RI Hari Senin, 19 Agustus 2024 dalam rangka Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Jadwal Kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembahasan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2024.
8. Rapat Intern BAKN DPR RI Hari Senin, 19 Agustus 2024 dalam rangka Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Jadwal Kegiatan BAKN DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembahasan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2024.
9. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Dr. Andi Ilham Paulangi, MI.Kom, Dosen Pascasarjana STIE Mulia Pratama, pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2024 dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelahaan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
10. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Irwan Suliantoro, Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, pada tanggal 11 September sampai dengan 13 September 2024 dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelahaan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
11. Rapat Kerja (Raker) BAKN DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, Hari Selasa, 10 September 2024 Dalam rangka penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait Cukai Hasil Tembakau dan PMN.